

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Fakultas Hukum Unpad, 2000.

\_\_\_\_\_, *Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (makalah yang di sampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 194), hlm. 1-3, dikutip dari Maria Farida, Ilmu Perundangundangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Cet. Ke-3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

HAW Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Rusell & Russel, New York, 1945.

HD. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofstukken Van Administratief Recht*, Vuga, S-Gravenhage, 1995.

Henc Maarseveen Dalam Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Surabaya, 1997.

Hotman Pardomuan Sibuca dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Jakarta, 2009.

I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, Bandung, 2008.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Lihat Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem*

*Pementahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.  
King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek*

*Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.

Laurensius Arliman S, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*,

Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media,

Bandung, 2011.

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,  
2015.

Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*,

Cet. Ke 1, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Marbun, *DPR Daerah, Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Cet ke-1,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi,*

*Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah*

*Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1998.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar

Lampung, 2009.

Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*,  
Rafika Aditama, Jakarta, 2004.

Philipus M. Hadjon, *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum, Dalam  
Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Jakarta, Universitas  
Trisakti, 2012.

\_\_\_\_\_, *Tentang Wewenang, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi*,  
Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

\_\_\_\_\_, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada  
University Press, Yogyakarta, 1993.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,  
1994.

Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Gajah Mada University  
Press. Yogyakarta, 1999.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cet. 1*, Pustaka Kartini,  
Jakarta, 1991.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  
Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa,  
Jakarta, 2001

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.  
Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja



Grafindo Pesada, Jakarta, 2019.

\_\_\_\_\_, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar  
Maju, Bandung, 1990.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, UI Press, Jakarta, 1976.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,  
2008.

Sri Zul Chairiah, *Nagari Minangkabau dan Desa Di Sumatera Barat, Sumatra  
Barat, Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu*, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:  
Rineka Cipta, 2012

Sukardi, *Buku Ajar Teknik Perancangan Perundang-Undangan*, Fakultas  
Hukum, Universitas Airlangga, 2010.

Stout HD, *De Betekenissen Van De Wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan  
Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni,  
Bandung, 2004.

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar,  
Yogyakarta, 2005.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*,  
Rajawali Pres, Jakarta, 2010.

## B. Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020  
Tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Serta Perlindungan  
Masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang  
Pemerintahan Nagari.

Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Perbuatan Maksiat, Proses Pernikahan dan Pelarangan Hiburan Malam di  
Nagari Ujung Gading.

Peraturan Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Nomor 06 Tahun 2017  
Tentang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

### C. Jurnal

Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Di Indonesia, *PERSPEKTIF: Jurnal Perspektif*, Vol. 21, No. 3, September  
2016

Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni, Eksistensi Pemerintahan Nagari  
di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah, *Jurnal Bakaba, Volume*

*Nomor 2*, 2018.

Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, *Jurnal*

*Legislasi Indonesia*, 2016.

Sahnan Sahuri Siregar, Otong Rosadi, dan Darmini Roza, Penyusunan Produk Hukum Sebagai Kewenangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, *Jurnal Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, Vol 3 No 2, 2020.

#### D. Website

Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022. Pukul 20.00 WIB.

Dikutip dari <https://www.hukumonline.com> diakses tanggal 28 September 2022. Pukul 12.00 WIB.

Samhis Setiawan, “Pengertian Nagari Menurut Para Ahli Lengkap”, diakses dari <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-nagari-menurut-para-ahli-lengkap/>, pada tanggal 10 Agustus pukul 22.17.

